

PROSPEK EKSPOR IMPOR INDONESIA PASCA RUNTUHNYA MENARA WTC DI AS*

Murati Farida Hasan

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah melumpuhkan perekonomian nasional. Sektor riil tersendat, pertumbuhan ekonomi negatif, bunga kredit tinggi, investasi terhenti, inflasi melambung, nilai rupiah merosot dan kegiatan perdagangan luar negeri menurun.

Namun pada tahun 2000, tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai tampak. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator, antara lain inflasi yang terkendali di bawah 2 digit, pertumbuhan ekonomi positif, bunga kredit bank menurun dan ekspor-impor meningkat.

Perkembangan tersebut memberikan rasa optimis bahwa proses pemulihan ekonomi tahun 2001 akan berlangsung lebih cepat. Namun perkembangan ekonomi

nasional dalam 3 bulan pertama tahun ini kurang menggembirakan, ekspor menurun dan harga barang merangkak naik, yang antara lain dipicu oleh kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar serta meningkatnya tuntutan kenaikan upah.

Untuk melanjutkan langkah-langkah pemulihan ekonominya nasional, tidak dapat lagi ditangani hanya dengan pertimbangan ekonomi saja, tetapi harus meluas ke sektor lain. Terutama keamanan, stabilitas politik, penegakkan hukum dan masalah sosial. Ini berarti tantangan yang sedang kita hadapi sekarang sangat kompleks. Penanganannya pun memerlukan komitmen dari semua komponen bangsa.

Untuk meningkatkan sektor ekonomi diperlukan investasi yang besar, dan investasi hanya bisa didorong apabila tercipta iklim usaha yang kondusif, yaitu adanya

* Tuisan ini pernah disampaikan dalam Kuliah Dosen Tamu (Tenaga Ahli) di Program Studi IESP FE UMY, 29 Nopember 2001.

kemudahan prosedur, peraturan daerah yang mendukung, adanya jaminan keamanan dan stabilitas politik serta penegakkan hukum dan kebijakan ekonomi yang konsisten.

Dalam situasi ekonomi yang masih tertekan oleh pengaruh krisis serta menurunnya perekonomian global, sesungguhnya ekspor dapat diharapkan sebagai penghela kegiatan ekonomi di dalam negeri. Peningkatan ekspor, selain berperan sebagai sumber devisa yang diperlukan untuk menjamin stabilitas moneter, juga berfungsi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dalam negeri yang pada gilirannya menyerap tenaga kerja.

KEBIJAKAN PENGEMBA- NGAN EKSPOR

Beragam kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah untuk menunjang peningkatan perolehan devisa sebagai salah satu transfer dana pemulihan perekonomian negara. Deregulasi di sektor pemasaran internasional terus dilakukan dan diarahkan kepada mekanisme pasar global seperti halnya penghapusan hambatan-hambatan pemasaran secara bertahap, termasuk penurunan bea masuk serta penyerdahan ketentuan-ketentuan lain, seperti perizinan, serta diberlakukannya Undang-Undang Anti Monopoli.

Di lain sisi, sesuai dengan Keputusan Menperindag Nomor. 558/MPP/Kep/12/1998 jo Keputusan Menperindag Nomor: 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, pemerintah juga tetap memperhatikan kepentingan nasional dan perjanjian bilateral, antara lain menjamin kelangsungan bahan baku industri kecil, menjamin kebutuhan pupuk bagi petani, memberikan perhatian lingkungan hidup dan adanya kuota tekstil produk tekstil.

Dalam rangka memperhatikan kepentingan nasional dan perjanjian bilateral tersebut, maka mata dagangan ekspor dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

- Di atur tata niaga ekspornya
- Diawasi ekspornya
- Di larang untuk diekspor
- Bebas dipasarkan di pasar internasional

Namun demikian, perlu tetap disadari bahwa tantangan yang sedang dihadapi Indonesia memang sangat berat. Sektor perbankan sebagai sumber pembiayaan produksi dan ekspor, belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, kepercayaan importir luar negeri terhadap L/C yang dibuka perbankan nasional belum sepenuhnya pulih dan nilai rupiah masih terus melemah. Padahal ketergantungan ekspor terhadap bahan baku impor masih tinggi.

PERKEMBANGAN EKSPOR

Total nilai ekspor pada tahun 2000 adalah sebesar US\$62,12 milyar, dengan rincian untuk ekspor migas sebesar US\$14,37 milyar dan ekspor nonmigas sebesar US\$47,76 milyar, atau naik sebesar 27,65% dibandingkan tahun 1999 yang bernilai US\$48,67 milyar. Di mana ekspor migas meningkat sebesar 46,71% dari US\$9,79 milyar menjadi US\$14,37 milyar dan untuk ekspor non-migas meningkat sebesar 22,65% dari US\$38,87 milyar menjadi US\$47,76 milyar.

Sementara itu realisasi ekspor nonmigas periode Januari s.d. Juli 2001 tercapai senilai US\$26,08 milyar atau turun sebesar 3,61% dibanding periode yang sama pada tahun 2000 yang bernilai US\$27,06 milyar. Penurunan terbesar dialami oleh produk kopi, teh dan rempah-rempah yang mengalami penurunan sebesar 36,31%. Sedangkan ekspor produk industri yang mengalami penurunan terbesar adalah pulp, kertas dan produk kertas yang mengalami penurunan sebesar 27%. Penurunan ekspor tersebut disebabkan karena lesunya pasar dunia, di samping Indonesia, banyak negara juga mengalami penurunan eksportnya.

Walaupun beberapa komoditi mengalami penurunan eksportnya, tetapi masih ada beberapa komoditi

yang mengalami kenaikan eksportnya, di antaranya adalah ekspor tekstil dan produk tekstil yang mengalami kenaikan sebesar 1,3%.

Kenaikan ekspor tekstil dan produk tekstil tersebut karena:

- Adanya peningkatan efisiensi sistem produksi selama krisis, sehingga harga produk dan kualitas mampu bersaing.
- Masih terdapatnya kepercayaan pihak pengimpor (*buyers*), walaupun iklim politik dan ekonomi kurang kondusif, terutama karena kedewasaan masyarakat dalam menyikapi kondisi politik dan ekonomi.
- Pengalaman eksportir dalam menghadapi krisis selama 3 tahun, sehingga mampu melakukan perlindungan (*hedging*) terhadap resiko bisnis yang dihadapinya,
- Dengan menguatnya mata uang US Dollar terhadap Rupiah, maka mendorong eksportir berani mengambil kontrak ekspor,
- Kebijakan pemerintah dalam menyederhanakan prosedur ekspor dan promosi dagang yang terencana oleh swasta dan pemerintah,
- Lebih optimalnya pemanfaatan kuota tekstil dan produk tekstil (TPT).

Jika diasumsikan realisasi 5 bulan terakhir sama dengan realisasi

rata-rata 7 bulan pertama, maka angka prognosa ekspor nonmigas tahun 2001 adalah sebesar US\$ 44,72 milyar. Angka tersebut apabila dibandingkan dengan tahun 2000 yang berjumlah US\$47,76 milyar, mengalami penurunan sebesar 6,36%.

Proyeksi tersebut masih bisa ditingkatkan, apabila:

- Kondisi perekonomian dunia mulai membaik
- Dampak runtuhnya gedung WTC di Amerika Serikat tidak mempengaruhi pasar produk ekspor Indonesia di AS,
- Kondisi keamanan relatif stabil,
- Kurs valuta asing stabil,
- Cuaca iklim mendukung dan tidak terjadi bencana alam,
- Optimalisasi utilisasi kapasitas produksi.

PROSPEK EKSPOR IMPOR INDONESIA

Meledaknya *World Trade Centre* (WTC), yang diikuti dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani tindakan anti teror, dan perubahan kebijakan dalam bidang perdagangan luar negerinya, serta adanya isu *sweeping* terhadap warga Amerika Serikat di Indonesia, dikhawatirkan akan berdampak pada melemahnya atau bahkan hilangnya pasar Amerika Serikat dan pasar di beberapa negara

Uni Eropa. Padahal di satu sisi, Amerika Serikat merupakan pasar utama bagi produk dari Indonesia, termasuk dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang pangsa pasarnya mencapai 45%. Oleh karena itu beberapa eksportir Indonesia termasuk DIY, sudah mulai resah dengan kondisi tersebut, karena sudah ada *buyers* Amerika Serikat yang membatalkan *order*-nya.

Kondisi ini menjadikan beberapa eksportir mencoba menerobos pasar lain, misalkan ASEAN (Brunei Darussalam, Singapura) dan negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam). Walaupun memerlukan waktu relatif lama penyesuaian, misalnya untuk produk mebel, harus merubah desain-desain yang cocok dengan kultur/ kondisi rumah di negara tersebut, semua itu merupakan prospek bagi bagi pasar Indonesia, namun harus didukung dengan adanya dari pemerintah.

PROGRAM JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Agar pengembangan dan peningkatan ekspor dapat berhasil dengan seoptimal mungkin diperlukan adanya dukungan program yang harus dijalankan. Program ini dapat dibedakan menjadi program jangka pendek dan program jangka panjang.

Program Jangka Pendek

Program jangka pendek ini sangat diperlukan dalam pencapaian upaya-upaya untuk pengembangan dan peningkatan ekspor. Program-program yang telah dan akan dilaksanakan antara lain :

- Peningkatan daya saing,
- Optimalisasi pemanfaatan kuota yang diberikan oleh negara-negara pemberi kuota kepada Indonesia,
- Meningkatkan koordinasi sistem informasi antara pusat dengan daerah maupun antar daerah,
- Peningkatan sumber daya manusia,
- Membuka akses pasar baru,
- Mendorong peningkatan peranan Atperindag (Atase Perindustrian dan Perdagangan) dalam rangka perluasan pasar.

Program Jangka Panjang

Program jangka panjang merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk dapat mendukung upaya-upaya pengembangan dan peningkatan ekspor jangka pendek. Program ini menyangkut :

- Penetapan komoditas yang mempunyai daya saing ekspor untuk tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), maka perlu

dipertimbangkan adanya upaya pemerintah dalam jangka panjang untuk mendorong pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk memilih serta mengembangkan masing-masing komoditi andalannya. Apabila setiap propinsi satu komoditi unggulan, berarti Indonesia mempunyai 33 komoditi andalan.

- Peningkatan kerjasama luar negeri, Mendorong peningkatan investasi,

PERMASALAHAN DAN UPAYA PENINGKATAN EKSPOR

Permasalahan Yang Dihadapi

Keberhasilan upaya-upaya untuk pengembangan dan peningkatan ekspor sangat ditentukan dengan adanya penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang harus diatasi adalah:

- Belum stabilnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, sehingga sulit menentukan perhitungan nilai produksi, dan akibatnya sulit membuat kontrak jangka panjang, hal ini akan mempengaruhi terhadap kepastian pasar ekspor. Sementara itu, perekonomian Indonesia juga masih dihadapkan kepada per-

masalah ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) akibat adanya retribusi di beberapa daerah untuk mengejar perolehan PAD,

- Belum pulihnya kepercayaan bank mitra dagang asing, maka sistem pembayaran luar negeri dalam bentuk L/C sulit dilaksanakan. Hal ini menyulitkan dalam pelaksanaan impor bahan baku untuk produk ekspor,
- Perubahan lingkungan perdagangan internasional yang mengarah ke globalisasi, sehingga persaingan semakin ketat. Suksesnya penurunan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor, mengakibatkan persaingan sangat ditentukan oleh kualitas, standar dan harga, ketepatan pengiriman dan berbagai macam jasa lainnya.
- Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat adanya WTO (*World Trade Organization*) adalah penerapan dan penegasan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) didasarkan kepada kesepakatan internasional tentang *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).

Upaya Penyelesaian Masalah

Menghadapi berbagai kendala yang ada, maka pemerintah melalui beragam kebijakan telah berupaya untuk mengatasi hambatan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Peningkatan daya saing, dengan program:
 - a. Kemudahan impor bahan baku dan penunjang untuk produk-produk dengan tujuan ekspor,
 - b. Kemudahan kapabeanan dan prosedur ekspor.
 - c. Penerapan standar-standar internasional berkaitan dengan mutu produk maupun isu lingkungan, antara lain ISO 9000 dan ISO 14000,
 - d. Pemasyarakatan hal-hal yang berkaitan dengan HaKI dan *Social Accountability* (SA 8000),
2. Peningkatan struktur komposisi komoditi ekspor, dengan program:
 - a. Diversifikasi produk ekspor baik secara vertikal maupun horizontal,
 - b. Memperkuat basis produksi dan mendukung komoditi unggulan.
3. Perluasan Pasar Tujuan Ekspor, dengan program;
 - a. Mempertahankan pasar tradisional (ASEAN, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang),
 - b. Penetrasi pasar alternatif yang tidak menerapkan kuota dan memiliki kesamaan kultur,

- c. Peningkatan peranan perwakilan luar negeri,
 - d. Pembentukan misi dagang,
4. Kebijaksanaan impor, dengan program:
 - a. Melakukan harmonisasi tarif bea masuk,
 - b. Penurunan/ penghapusan tarif di kesepakatan AFTA dan WTO dalam rangka peningkatan efisiensi,
 - c. Pengawasan terhadap tingkah laku (oligopoli/ monopoli) yang merugikan eksportir,
 - d. Penggunaan mekanisme imbal beli untuk mendorong ekspor,
 5. Peningkatan perdagangan lintas batas dengan mengupayakan adanya *marketing point* di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga,
 6. Berupaya meyakinkan dan mendorong minat negara mitra dagang, khususnya sektor swasta untuk menggali potensi kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia,
 7. Memanfaatkan peluang bantuan tehnik yang tersedia pada forum bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mengembangkan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah untuk peningkatan daya saing produk-produk ekspor
 8. Menjajagi dan mengupayakan bentuk atau cara perdagangan non konvensional, seperti cara pembayaran dengan mata uang lokal (*Bilateral Arrangement Payment*) antara kawasan Asia Timur dengan Asia Tenggara.

PERDAGANGAN LUAR NEGERI PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Sebagai perwujudan pelaksanaan UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong dan memperkuat peran daerah dalam pembangunan di segala bidang, termasuk bidang perdagangan luar negeri. Sejalan dengan itu, beberapa kebijakan perdagangan luar negeri yang tadinya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara bertahap dialihkan kepada pemerintah daerah, terutama yang bersifat perizinan, seperti Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) bagi Perusahaan Kecil dan Koperasi.

Namun, beberapa hal yang terkait dengan komitmen dan aturan internasional masih ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti surat Keterangan Asal yang didasarkan atas perjanjian bilateral dan multilateral.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimenger-

ti, namun patut dipahami bahwa setiap tambahan pungutan akan mengurangi daya saing produk ekspor, padahal peningkatan ekspor diperlukan untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah. Di samping itu, kebijakan pemerintah daerah jangan sampai bertentangan dengan komitmen dan aturan-aturan internasional karena dapat menimbulkan masalah atau reaksi dari mitra dagang Indonesia.

Salah satu kunci keberhasilan pengembangan ekspor sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah adalah peningkatan daya saing. Oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perdagangan hendaknya berorientasi pada peningkatan efisiensi dan mutu produk, seperti:

- Penyederhanaan administrasi prosedur ekspor, termasuk ke luar masuk barang di pelabuhan.
- Menjamin kelancaran impor bahan baku/ penolong serta barang modal untuk tujuan ekspor.
- Mengurangi/ menghilangkan pungutan resmi dan tidak resmi yang dapat meningkatkan biaya ekspor dan impor.
- Mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dalam negeri, seperti lalu lintas perdagangan komoditas ekspor, dengan mem-

perlancar perdagangan lintas propinsi dan kabupaten/kota.

- Peningkatan mutu komoditi ekspor.
- Pemberdayaan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang sudah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

1. Kebijakan perindustrian dan perdagangan dalam rangka pengembangan dan peningkatan ekspor untuk mengoptimalkan perolehan devisa, dibutuhkan langkah-langkah kebijakan terobosan sebagai berikut:
 - Peningkatan daya saing produk ekspor, baik melalui penghapusan pungutan-pungutan yang membebani produk ekspor, peningkatan mutu dan penerapan teknologi maupun peningkatan efisiensi.
 - Pemberian insentif dalam batas tertentu seperti kredit ekspor, keringanan pajak, kemudahan dan kelancaran bahan baku.
 - Peningkatan akses pasar melalui kerjasama perdagangan, baik bilateral, regional, multilateral maupun internasional,

- Penganekaragaman/diversifikasi dan inovasi-inovasi produk serta pasar yang didukung oleh informasi pasar yang aktual,
 - Optimalisasi pemanfaatan kuota, dengan diberlakukannya manajemen kuota yang transparan, Mendorong peningkatan investasi dan kepastian berusaha,
2. Di samping itu, pelayanan kepada dunia usaha, baik kualitas

maupun kuantitas harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Pembinaan terhadap eksportir kecil juga menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah. Demikian juga kerjasama dengan mitra dagang Indonesia dan kegiatan promosi ekspor akan tetap menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan perdagangan luar negeri.